

# 6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

## Polemik Lockdown di Tengah Kegelisahan Kaum Marjinal

Pendi Ahmad

Dosen Universitas Pamulang, Banten



[10.15408/adalah.v4i1.15392](https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15392)

### Abstract:

*With the implementation of the lockdown, then millions of people, especially those whose livelihoods are Traders, Laborers, lower-middle-class online motorcycle taxis, will lose income. The government must facilitate all their needs. Ensure that every community member has the same opportunity to obtain food and basic necessities at an affordable price. The policy of the Central Government to impose or not implement a lockdown policy must be able to provide certainty for the Marginal, because this country exists and grows not because of one and a few people, but we exist because of togetherness. But whatever policies the government will pursue right now are awaited by millions of people.*

**Keywords:** Lockdown, Livelihoods, Policy.

### Abstrak:

*Dengan diberlakukannya lockdown, maka jutaan orang terutama yang mata pencahariannya sebagai Pedagang, Buruh, Ojek online menengah ke bawah akan kehilangan penghasilan. Pemerintah harus memfasilitasi segala kebutuhan mereka. Memastikan bahwa setiap warga masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh makanan dan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kebijakan Pemerintahan Pusat untuk memberlakukan atau tidak menjalankan kebijakan lockdown harus dapat memberikan kepastian bagi kaum Marjinal, karena negara ini ada dan tumbuh bukan karena satu dan beberapa orang saja, tetapi kita ada karena kebersamaan. Tetapi kebijakan apapun yang akan ditempuh pemerintah saat ini tengah ditunggu oleh jutaan masyarakat miskin.*

**Kata Kunci:** Lockdown, Mata Pencaharian, kebijakan

## **Prolog**

Organisasi kesehatan dunia WHO (World Health Organization) secara terang-terangan bersurat meminta Presiden Jokowi sebagai kepala negara agar lebih serius menanggulangi virus corona dan menyatakan keadaan darurat nasional untuk menghindari jatuhnya banyak korban. Kasus positif Virus Corona atau Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah. Apalagi, kapasitas tenaga medis dan layanan rumah sakit semakin tertekan dengan meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia. Layanan kesehatan di Jawa dan Bali ini diperkirakan tak lagi mampu menangani pasien virus corona pada akhir April 2020 jika tidak ada tindakan segera untuk menekan penambahan kasus baru.

Data terbaru menunjukkan penambahan 219 kasus baru. Dengan demikian hingga 10 April 2020, total kasus positif virus corona mencapai 3.512 orang. Sementara itu, pasien yang sembuh dari virus corona bertambah 30 orang. Sehingga total pasien sembuh saat ini menjadi 282 orang. Sedangkan pasien meninggal dunia juga masih bertambah 26 orang, sehingga totalnya menjadi 306 orang (sumber Merdeka.com Jumat 10 april 2020 16:30).

## **Desakan Pemberlakuan Lockdown Masyarakat Kepada Pemerintah**

Dalam beberapa hari belakangan ini, berbagai kalangan masyarakat mendorong agar pemerintah pusat segera melakukan lockdown secara nasional sebagai respon penyebaran virus corona yang makin meningkat. Desakan makin kuat manakala salah satu menteri anggota kabinet pemerintah dinyatakan positif corona. Lockdown juga dapat diartikan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat luas, termasuk bagi petugas kesehatan dari serangan wabah penyakit yang sedang menjalar ke segala penjuru bumi. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pelaksanaan Lockdown harus dilakukan dengan tingkat kedisiplinan yang

tinggi. Di negara-negara yang telah menerapkan Lockdown, anggota kepolisian dikerahkan untuk menindak warga yang nekat keluar saat masa Lockdown. Hukuman bagi warga yang melanggar pun tak main-main, mulai dari denda puluhan juta rupiah hingga kurungan penjara.

Persoalan wabah virus corona saat ini bukan hanya masalah nasional, tetapi telah menjelma menjadi kegelisahan di berbagai negara. Tidak kurang 177 negara telah terinfeksi. Namun masing-masing negara memiliki strategi yang berbeda melindungi warganya. Pemerintah sebenarnya telah memiliki pijakan hukum melakukan

lockdown dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UUKK).

Di samping itu, kesuksesan kebijakan tersebut mesti didukung setidaknya oleh empat pilar utama yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan dukungan internasional. Tanpa soliditas dari stakeholders tersebut, kebijakan lockdown bisa menjadi bomerang dan memicu krisis yang tidak kalah serius. Dalam

UUKK, ada empat kategori jenis kekarantinaan kesehatan masyarakat yaitu karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan pembatasan sosial berskala besar.

Sebelum menentukan jenis kekarantinaan tersebut, pemerintah pusat harus menetapkan kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat dengan syarat utama keselamatan masyarakat benar-benar sedang dalam ancaman serius dengan mempertimbangkan dukungan sumber daya, teknik operasional, kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, ada banyak aspek bisa



123rf

dilihat, yaitu soal ketimpangan yang akan terjadi. Bagi kaum berduit kota atau kelas menengah atas, lockdown tak jadi persoalan karena mereka bisa mampu menimbun stok pangan di rumah dalam jumlah besar. Bagaimana dengan orang-orang tak mampu, pengangguran atau orang-orang yang mendapatkan kebutuhan sehari-hari dari kerja harian? dampaknya tentu akan terasa bila lockdown dilakukan.

### **Dampak Negatif Lockdwon**

Dampak negatif lain dari lockdown adalah aktivitas ekonomi yang lumpuh. Hal ini memicu turunnya produktivitas setiap orang. Aktivitas produksi dan suplai menjadi terganggu. Namun di sisi lain, karena warga masyarakat tetap tinggal di rumah konsumsi pun ikut merosot. Lockdown juga berpotensi besar membuat orang-orang berbondong-bondong menarik uangnya dari bank dan lebih memilih menyimpannya dalam bentuk cash. Jika ini terjadi tentu likuiditas perbankan akan jadi kering kerontang. Ini jelas bahaya besar bagi perekonomian. Opsi lockdown ini bagaikan 'makan buah si malakama'. Dimakan ibu mati, tak dimakan bapak mati. Jika lockdown dilakukan, perekonomian terancam, jika tidak di lockdown jutaan nyawa jadi taruhan.

Memang banyak di antara masyarakat kecil yang keberatan penerapan kebijakan karantina lantaran takut penghasilan mereka tergerus drastis. Juga pasokan sembako menjadi sulit. Namun, apabila pemerintah bisa menjamin ketersediaan pasokan dan kepastian penghasilan, mayoritas mereka setuju. Publik juga meminta edukasi bagaimana cara pencegahan dan penanganan wabah corona. Selama ini upaya pemerintah untuk mengedukasi terkait bahaya corona dirasakan masih minim. Masyarakat hanya tahu dari pemberitaan.

### **Langkah Persiapan Lockdown**

Lockdown harus dipersiapkan dengan matang. Pertama, adalah batasan lockdown yang harus jelas. Pemerintah harus tegas da-

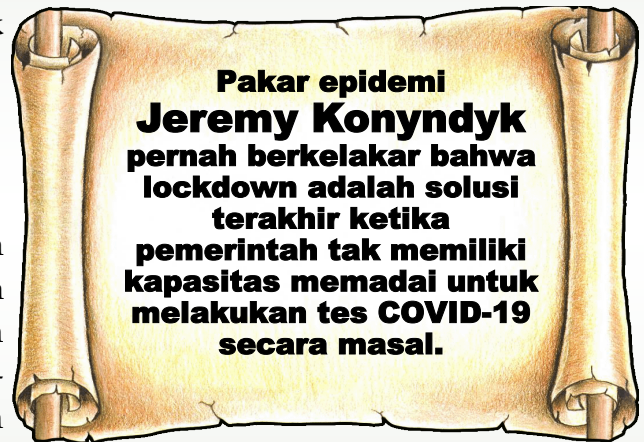
lam mendefinisikan lockdown ini, tak boleh setengah-setengah. Kedua, pemerintah harus menyiapkan segala protokol yang dibutuhkan untuk lockdown. Poin pentingnya adalah, pemerintah harus memastikan keamanan warga masyarakat tetap terjamin. Keamanan ini bukan hanya dari segi keamanan kesehatan dan fisik, tetapi juga keamanan finansial.

Dengan diberlakukannya lockdown, maka jutaan orang terutama yang mata pencahariannya sebagai Pedagang, Buruh, Ojek online menengah ke bawah akan kehilangan penghasilan. Pemerintah harus memfasilitasi segala kebutuhan mereka. memastikan bahwa setiap warga masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh makanan dan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

## Epilog

Kebijakan Pemerintahan Pusat untuk memberlakukan atau tidak menjalankan kebijakan lockdown harus dapat memberikan kepastian bagi kaum Marjinal, karena negara ini ada

dan tumbuh bukan karena satu dan beberapa orang saja, tetapi kita ada karena kebersamaan. Kebijakan apapun yang akan ditempuh pemerintah saat ini tengah ditunggu jutaan masyarakat, meski lockdown adalah solusi paling populer buat menghalau wabah COVID-19, ia bukan harga mati. Pakar epidemi Jeremy Konyndyk pernah berkelakar bahwa lockdown adalah solusi terakhir ketika pemerintah tak memiliki kapasitas memadai untuk melakukan tes COVID-19 secara masal. Jika deteksi dini dapat dilakukan dengan cekatan dan masif, serta masyarakat gigih mengamalkan social distancing, sebetulnya lockdown dapat dihindari



## Referensi:

Arif, Ahmad. "Layanan Kesehatan Hampir Kolaps," diakses melalui <https://bebas.kompas.id/baca/bebas-akses/2020/04/02/layanan-kesehatan-hampir-kolaps/> pada tanggal 1 April 2020.

Garitjo, Dany; & Intan, Ruhaeni. Update, "4 Hukuman bagi Pelanggar Lockdown, dari Denda sampai Penjara", diakses melalui <https://www.suara.com/news/2020/03/22/162039/4-hukuman-bagi-pelanggar-lockdown-dari-denda-sampai-penjara> pada tanggal; 5 April 2020.

<https://www.merdeka.com/jakarta/update-10-april-2020-pasien-positif-covid-19-di-jakarta-1810-orang.html> pada 10 April 2020

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, (2013). Pedoman Umum Kesiapsiagaan Menghadapi Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus (MERS-CoV).

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Penasehat:** Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur:** Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. **Penyunting:** Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout:** Imas Novita Juaningsih, Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, Azizah Ratu Buana.